

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 3

Polisi Usut Dugaan Penyimpangan Dana Panwaslu

KUPANG — Penyidik Polres Kupang Kota memeriksa sejumlah pihak terkait aliran dana pengawasan yang dikelola Panwaslu Kota Kupang. Polisi menduga uang dana pengawasan Rp 3 miliar telah disalahgunakan.

“Sejumlah pihak telah kami undang untuk memberikan penjelasan guna mendapatkan benang merah pengelolaan dana hibah yang dicairkan melalui APBD Kota Kupang itu,” kata Kapolres Kota Kupang, AKBP Anton CH Nugroho, melalui Kasat Reskrim AKP Lalu Musti Ali Lee menjelaskan di Kupang, Kamis (23/3).

Sejumlah pihak itu, di antaranya, pejabat lingkup Pemkot Kupang yang berkaitan dengan aliran dana melalui mekanisme naskah perjanjian hibah daerah (NHPD).

Hal ini penting untuk bisa menggabungkan duduk soal aliran dana ini hingga pemanfaatannya di Panwaslu Kota Kupang yang tercium amis penyelewengan. Sehingga, memantik sejumlah aksi para pengawas lapangan yang menuntut hak yang belum terlunaskan.

Sembari melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan dari para pihak terkait, penyidik Polres Kupang Kota juga sedang menanti hasil audit internal. Hasil audit itu sedang dilakukan oleh pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) pemanfaatan alokasi

anggaran pengawasan itu.

“Pihak PPK dari Sekretariat Bawaslu sedang melakukan audit internal dan akan kita minta hasilnya untuk penyelidikan lanjutan,” katanya.

Dia juga mengatakan, secara kelembagaan, Polres Kupang Kota juga akan meminta audit BPK sebagai lembaga resmi untuk dijadikan dasar penun-



Polisi juga sedang menanti hasil audit internal dari Bawaslu.

tutuan jika terbukti terjadi penyimpangan pemanfaatan keuangan negara tersebut. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang Rens Tokoh mengaku telah menerima undangan dari pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan terkait aliran dana tersebut.

Menurut dia, dana sebesar Rp 3 miliar untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak 2017 Kota Kupang sudah dicair pascapendanaan NHPD antara Pemkot Kupang

dan Panwaslu Kota Kupang.

“Soal pemanfaatan sudah menjadi kewenangan pihak Panwaslu dan seharusnya disampaikan pemanfaatannya sebagai bentuk tanggung jawab, namun tidak kunjung dilakukan hingga mencair persoalan ini. Ya kita lihat saja,” katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Kota Kupang untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022, Pemerintah Kota Kupang mengucurkan anggaran senilai Rp 3 miliar untuk pemanfaatan pengawasan oleh Panwaslu Kota Kupang.

Alokasi dana itu dicair pascapendanaan NHPD antara Pemerintah Kota Kupang dan Panwaslu Kota Kupang.

Alokasi anggaran itu oleh Panwaslu dimanfaatkan untuk kepentingan operasional, alat tulis kantor, serta honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah enam orang, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) berjumlah 51 orang, serta Pengawas Tempat pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 660 orang.

Namun, usai pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari lalu, pembiayaan operasional, alat tulis kantor (ATK), dan honor sejumlah petugas itu belum juga terlunaskan.

■ antara ed: muhammad hafid